



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 124 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN
MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Dalam keadaan tertentu, penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang tidak tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022, dimungkinkan penyusunannya sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KETIGA : Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, harus dilengkapi dengan kajian teknis dan mendapatkan izin prakarsa dari Menteri Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

Tini Mardini



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 124 TAHUN 2021
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI
DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN
2022

MATRIK PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2022

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	1. penyusunan kebutuhan; dan 2. pengusulan kebutuhan.													Tindak lanjut Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
2.	Peraturan Menteri	Basis Penyusunan Data Rencana	1. Spesifikasi data peta;													Tindak lanjut Pasal 203 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
4.	Keputusan Menteri	Penetapan Kawasan Konservasi	1. Penetapan kategori kawasan; 2. Penetapan zona; 3. Batas koordinat; dan 4. Peta.													Tindak lanjut 1. Pasal 7 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan 2. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
5.	Keputusan Menteri	Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan yang Terancam Punah	Penetapan Jenis Ikan yang Terancam Punah													Kumulatif terbuka Tindak lanjut Pasal 7 ayat (1) huruf u Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
																tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
6.	Keputusan Menteri	Penetapan Rencana Aksi Pelestarian	1. Pendahuluan yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan; 2. Isu dan permasalahan: a. penurunan populasi karena penangkapan berlebih, tangkapan sampingan, spesies invasif, perdagangan illegal; b. kerusakan ekosistem karena alat tangkap yang merusak, dampak pembangunan, pencemaran perairan, perubahan iklim.													Kumulatif terbuka

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			3. Tantangan: <ul style="list-style-type: none"> a. Tumpang tindih dalam melakukan upaya pengelolaan; b. Dorongan ekonomi; c. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum d. Penguatan data dan informasi’; e. Rendahnya kesadaran masyarakat; 4. Kedudukan rencana aksi pelestarian; 5. Tahapan pengelolaan jenis ikan terancam punah; 6. Tahap pelaksanaan; 7. Tahap evaluasi; 8. Visi, misi, sasaran, dan program; dan 9. Sasaran pengelolaan tiap tahun.													
7.	Keputusan Menteri	Pencatatan, Pengadministrasian, dan Pemutakhiran data Kesesuaian Kegiatan	Tata cara terkait pencatatan, pengadministrasian, dan pemutakhiran data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)													Tindak lanjut Pasal 149 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)														Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
8.	Keputusan Menteri	Pendeklegasian Kewenangan penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) di Perairan Pesisir kepada gubernur.	Tata cara terkait pendeklegasian kewenangan penerbitan PKKPRL di Perairan Pesisir													Tindak lanjut Pasal 139 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
9.	Keputusan Menteri	Kuota Pengambilan untuk Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan Jenis Ikan dalam Appendiks II <i>Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora</i>	Menetapkan kuota pengambilan yang memuat nama jenis ikan, jumlah, ukuran, satuan, dan lokasi pengambilan setiap provinsi untuk pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan jenis ikan dalam Appendiks II <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>													Tindak lanjut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Diindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum Dalam Appendiks <i>Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora</i> , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019.

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
10.	Keputusan Menteri	Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap beberapa jenis ikan yang dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya yang belum ditetapkan harga patokannya													Tindak lanjut Pasal 10 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
11.	Keputusan Menteri	Bulan Cinta Laut	1. penetapan rencana aksi penanganan sampah laut 2. pembentukan kelompok kerja penanganan sampah laut													Tindak lanjut Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut

2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2015	Mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2015													Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		36/PERMEN-KP/2015 tentang Kriteria dan Pengelompokan Skala Kecil, Skala Menengah, dan Skala Besar dalam Pungutan Hasil Perikanan	tentang Kriteria dan Pengelompokan Skala Kecil, Skala Menengah, dan Skala Besar dalam Pungutan Hasil Perikanan													atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2.	Keputusan Menteri	Rencana Pengelolaan Perikanan	1. Pendahuluan; 2. Status perikanan terkini; dan 3. Rencana strategis pengelolaan perikanan.													Tindak lanjut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
3.	Keputusan Menteri	Alokasi Rumpon pada Jalur Penangkapan Ikan III di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	Alokasi Rumpon pada Jalur Penangkapan Ikan III di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia													Tindak lanjut Pasal 18 ayat (1) Permen KP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan API dan ABPI di WPPNRI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.
4.	Keputusan Menteri	Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian	Batas Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian													Tindak lanjut Pasal 226 ayat (2) Peraturan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Pengoperasian Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan dan Peta Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan.													Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
5.	Keputusan Menteri	Pelabuhan Pangkalan yang Telah Memenuhi Syarat Penarikan Pascaproduksi Atas Jenis PNBP yang Berasal dari Pemanfaatan SDA Perikanan	Menetapkan Pelabuhan Pangkalan yang Telah Memenuhi Syarat Penarikan Pascaproduksi													Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Tata Cara Rehabilitasi Lingkungan Budidaya	Pengaturan mengenai Tata Cara Rehabilitasi Lingkungan Budidaya													Tindak lanjut Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan
2.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2018 tentang Pakan Ikan	Pengaturan kembali mengenai Uji Proksimat													Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan

4. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

5. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	Revisi Pasal 49 ayat (5) dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam memutuskan banding administratif													
2.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Mengubah tugas Polsus WP3K dan kewenangannya													<p>1. Tindak lanjut Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>2. Menyesuaikan dengan:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p>

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
																b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan 3. Tindak lanjut Pasal 294 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
3.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan	Merubah pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan													1. Tindak lanjut Pasal 66B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2. Menyesuaikan dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
																Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

6. Inspektorat Jenderal

7. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

8. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

9. Biro Perencanaan

10. Biro Keuangan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
		Kelautan dan Perikanan													
2.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Kelola Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan kendaraan; 2. Jenis, jumlah, dan standar kendaraan; 3. Rencana kebutuhan kendaraan; 4. Tata tertib penggunaan kendaraan; dan 5. Monitoring dan evaluasi.												
3.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Sistem Akuntansi Instansi Kementerian; 2. Kelembagaan; 3. Sistem Akuntansi Keuangan Kementerian; 4. SIMAK-BMN; 5. Mekanisme; 6. Pembinaan; 7. Pengawasan; dan 8. Pelaporan.												Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

11. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
2.	Peraturan Menteri	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemetaan Lingkungan dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi; 2. Susunan Organisasi; 3. Kelompok Jabatan Fungsional; 4. Tata Kerja; 5. Eselonisasi; dan 6. Lokasi.												
3.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	Penambahan 1 (satu) divisi dalam struktur organisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan												Menyesuaikan hasil pembahasan dengan Kementerian PAN dan RB dengan menambah satu divisi.
4.	Peraturan Menteri	Pakaian Kerja dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Pakaian kerja dan atribut; 2. Pengawasan dan pembinaan; dan 3. Pengadaan.												
5.	Peraturan Menteri	Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan												Penyesuaian terhadap hasil evaluasi jabatan struktural, jabatan fungsional, dan pelaksana di lingkungan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
10.	Keputusan Menteri	Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022	Penjabaran rencana aksi pada 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024.													
11.	Keputusan Menteri	Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Identitas Jabatan; 2. Kompetensi Jabatan; dan 3. Persyaratan Jabatan.													Tindak lanjut Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara

12. Biro Hukum

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL											KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/PERMEN-KP/2018 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Menyempurnakan bantuan hukum untuk kasus pidana													Menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

13. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
2.	Peraturan Menteri	Pengelolaan Portal Konten Web di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konten Portal Web dan Situs Web; 2. Pengelolaan Portal Web; 3. Pengelolaan konten Portal Web; dan 4. Pemantauan dan evaluasi. 													

14. Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan logo; dan 2. Penambahan materi tata naskah elektronik. 													Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Penggunaannya.

15. Pusat Data, Statistik, dan Informasi

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan istilah pelaku utama; 2. Penambahan profesi pelaku utama pendukung; 3. Kuesioner pendataan Kusuka dan pengumpulan data produksi kelautan dan perikanan; 4. Perubahan logo; dan 5. Pencetakan kartu Kusuka. 													

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

